

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amin, Rahman. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Ali, Mahrus. Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press. 2016.
- Amidjo. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Armico 1985.
- Aminanto, Kif. "Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi". Jember: Jember Katamedia. 2017.
- Anggapurana, Ida, et al, Tindak Pidana dalam KUHP. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2022.
- Arsyad, Jawade. Korupsi Dalam Perspektif HAN. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Majalah KHN. 2004.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007.
- \_\_\_\_\_. Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing. 2003.
- Efendi. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Reflika Aditama. 2011.
- Erdianto, Effendi. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Reflika Aditama. 2011
- Dyah Octorina. Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Bandung : Reflika Aditama , 2004.
- Harkristuti, Harkrsnowo, 2003, Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia. Jakarta: Majalah KHN. 2003.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Kitgaard, Robert. Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Kusumah M.W. Tegaknya Supremasi Hukum. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. 2001.
- Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- \_\_\_\_\_. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico. 1988.
- Marpaung, Leden. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miharja. Mirjan. Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Moeljanto. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. 1984.
- Muladi, Nawawi, Barda. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Peduli Bangsa. 1989.
- Mulyadi, Lilik. “Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nurdjana. Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Pawennei, Mulyati, Tomalili, Rahmanuddin. Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung. 1981.
- Putra, Riski Perdana. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP). Jakarta: Kencana. 2016.
- Rianto, Bibit. Korupsi Go to Hell! Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Hikmah, 2009.
- Roskiah, Catrina and Marliani, Dessy. Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori Dan Praktik). Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Soedarto. Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1990.
- Suparni, Niniek. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Suyanto. Pengantar Hukum pidana. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Syarifuddin. “Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)”. Jakarta: Kencana. 2021.
- Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM Press, 2012.
- Usfa, Fuad. Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press. 2004.

Widijowati Dijan and Darmawan, Halim. *Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*. Malang. Literasi Nusantara Abadi. 2022.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantas Tindak pidana korupsi

## **C. Jurnal**

Anonym, *Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220510-null>, diakses pada 10 mei 2023.

Astika Nurul Hidayah, “*Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*,” *Jurnal Kosmik Hukum* 18, no. 2 (2018), hlm. 137.

Hambal, Rachmat. Et All, 2021, “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi,” *Jurnal Kepastian Hukum*, Wawasan Yuridika, 31 September 2021.

Kristian K, “*Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 2 (2017). 270-288.

Muammar, Helmi, et al, Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Widya Pranata Hukum: *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2 maret 2021.

Wantu, Fence M, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 Februari 2012.

Zaini, Agus, “Peran Kpk dengan kejaskaan dalam penaggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, ” *Jurnal Negara dan Keadilan* “, 2, Januari 2020.

### ***Sumber Lainnya***

Anonym, *Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220510-null>, diakses pada 10 mei 2023.

Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan relevansi yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan*, 2010

Matheus Nathanael Siagian, Nanda Oktaviani, *et all*, "*Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Jakarta; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021

Shilvina Widi, *KPK Tetapkan 149 Tersangka Korupsi pada 2022*, DataIndonesia, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/kpk-tetapkan-149-tersangka-korupsi-pada-2022>, diakses pada 10 mei 2023.

Tama S. Langkun, *et al. Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch, 2014.



